

MEMBERDAYAKAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Ilham Mashuri*

Abstract: Problem of a quality of school education has always been an interesting theme for discussion. But one thing that is still unnoticed by the education experts is the problem of the role of libraries in schools. The library is important. Everyone acknowledges that, as well as the importance of reading. However people rarely think of how students are encouraged to like reading and make it as a culture. The education quality should be supported by an adequate library. Therefore, there must be a synergy among the various components of education in schools to start reading habits from managing the library. This short article tries to answer how to empower the library that can compel students to like reading very much so that it will impact indirectly on the improvement of education quality in schools.

Keywords: School, Library, Empowerment.

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan nasional menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian serius dari pemerintah RI. Keseriusan itu diwujudkan dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pijakan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Satu hal yang sangat patut dicatat dilihat dari undang-undang tersebut adalah ditetapkan standar nasional pendidikan yang mencakup antara lain sarana dan prasarana pendidikan sebagai acuan pengembangan pendidikan. Di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan adalah perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang strategis dan

* Penulis adalah Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

mempengaruhi mutu pendidikan. Lebih jelas tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah bagian dari sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah/madrasah.¹

Perpustakaan di lembaga pendidikan – sekolah/ perguruan tinggi – memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, bahkan kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan bisa dilihat dari kondisi perpustakaan. Sekolah-sekolah yang berkualitas pasti ditunjang oleh perpustakaan yang memadai. Dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa setiap sekolah/ madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian sekolah wajib menyelenggarakan perpustakaan yang berkualitas demi mewujudkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Sedangkan bagaimana perpustakaan itu memenuhi standar, disebutkan bahwa 1) perpustakaan wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, 2) Perpustakaan sekolah/ madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3) Sekolah/ madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/ madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Undang-undang di atas mengamanatkan kepada sekolah tidak hanya untuk menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar tetapi juga menyediakan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/ madrasah. Perpustakaan mendapatkan perlakuan demikian karena di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan adalah perpustakaan.

¹ Lebih jauh lihat Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42-42

Dengan demikian, perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang strategis dan mempengaruhi mutu pendidikan. Lebih jelas tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah bagian dari sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah/madrasah.

Di era otonomi pendidikan seperti sekarang ini, kompetisi antar sekolah semakin ketat, tidak hanya dalam menjaring siswa baru (*input*) tetap dalam hal menghasilkan lulusan yang berkualitas (*output*). Dalam kondisi inilah sekolah-sekolah dituntut untuk berinovasi dengan berbagai program pengembangan. Sejauhmana sekolah berinovasi dan mengembangkan diri, sejauh itu posisi sekolah tersebut akan semakin diperhitungkan. Karena dengan langkah-langkah yang diambilnya sekolah bisa memproduksi lulusan yang berkualitas. Di antara inovasi dan pengembangan yang bisa dilakukan sekolah adalah dengan membenahi perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki makna penting tidak hanya demi peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik, tetapi juga semakin meneguhkan eksistensi bahkan masa depan lembaga pendidikan tersebut, karena perpustakaan menjadi salah unsur yang dinilai dalam hal akreditasi sekolah dan hasil akreditasi apakah A, B, C akan mempengaruhi tingkat kepercayaan calon peserta didik dan masyarakat untuk masuk dalam lembaga pendidikan tersebut.

Menilik fungsi yang demikian penting maka program pengembangan perpustakaan butuh kepedulian semua pihak tidak hanya pengelola perpustakaan tetapi juga semua elemen dalam masyarakat, di sinilah pentingnya "modal sosial" (*social capital*) dalam pengembangan perpustakaan.

B. Fakta Antagonis Perpustakaan Sekolah

Secara yuridis undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan telah mengamanatkan kepada pengambil kebijakan di tingkat sekolah (kepala Sekolah) untuk mengembangkan perpustakaan, dan secara sosiologis semua orang mengakui

pentingnya perpustakaan bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan kualitas pendidikan di lembaga tersebut, sekalipun demikian kondisi dan eksistensi perpustakaan di sekolah belum begitu menggemblakan. Bahkan bisa dikatakan bahwa perpustakaan di sekolah-sekolah menunjukkan “peran antagonis”, di satu sisi ia dianggap sebagai sesuatu yang sangat vital, namun di sisi lain kondisinya sangat memprihatinkan. Menurut survei yang dilakukan oleh Rebecca Knuth peran perpustakaan sekolah di negara-negara berkembang kurang disadari dan tidak menjadi prioritas, hal ini terlihat dalam 1) minimnya fasilitas perpustakaan, 2) kurangnya staf yang terlatih, dan 3) kualitas bahan pustaka yang buruk, sehingga perpustakaan hanya berperan sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat proses pendidikan.² Sedangkan menurut wawancara awal yang kami lakukan pada tahun 2009, tidak ada dukungan dari pengambil kebijakan di tingkat sekolah dan tingkat Dinas Pendidikan menjadi kendala yang paling besar dalam mengembangkan perpustakaan.³ Keberadaan perpustakaan sekolah mendapatkan kritik yang cukup tajam dari Lasa Hs. Menurutnya, di beberapa sekolah perpustakaan dibiarkan menderita. Kurikulum bolak-balik diganti, guru-guru berulang kali ditatar, dan kepala sekolah sampai jemu mengikuti penataran manajemen sekolah, tetapi nasib perpustakaan tidak pernah dipikirkan.⁴ Jika hal demikian terus berlanjut, bisa dibayangkan apa jadinya lembaga pendidikan. Beberapa masalah perpustakaan sekolah bila diurai lebih lanjut adalah:

² Anis Masruri dan Sri Rohyanti Zulaikha (ed.), *Coursepack on school/ teacher librarianship*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 53.

³ *Workshop Aplikasi Teknologi Informasi & Pengembangan Perpustakaan*, STAIN Kediri, Sabtu, 20 Juni 2009, dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta menyatakan bahwa program pengembangan perpustakaan tidak mendapatkan dukungan kebijakan dari kepala sekolah. Dalam Acara Seminar Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Kediri, 21 Desember 2009 masalah serupa juga banyak dikeluhkan oleh pengelola perpustakaan yang menjadi peserta pada acara tersebut.

⁴ Lasa Hs., *Mana jenen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: PINUS, 2007, hlm. 11.

1) Minimnya fasilitas Perpustakaan

Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan yang “memadai” bisa dihitung jari, bahkan SBI (Sekolah Berstandar Internasional) atau RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) belum menjadikan perpustakaan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Jika dua sekolah yang menjadi rebutan siswa “berprestasi” (baca: dan berduit) tersebut belum menjadikan pengembangan perpustakaan sebagai prioritas bagaimana dengan sekolah-sekolah lain, apalagi sekolah-sekolah di pelosok yang tidak masuk dalam sekolah favorit.

2) kurangnya staf yang terlatih

Belum semua sekolah memiliki pustakawan⁵ atau pengelola perpustakaan yang terampil. Di banyak sekolah pengelola perpustakaan diambil dari staf administrasi yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana mengelola perpustakaan atau guru yang dianggap memiliki *concern* terhadap perpustakaan—biasanya guru bahasa Indonesia. Hal ini menjadikan perpustakaan tidak dikelola secara profesional, bahkan di beberapa sekolah perpustakaan adalah tempat untuk menampung staf atau pegawai yang tidak produktif (baca: tempat buangan).

Sesuai data sebaran pustakawan di lembaga pemerintah termasuk di dalamnya sekolah di provinsi Jawa Timur, sekolah yang telah memiliki pustakawan baru satu, yaitu SMPN 1 Kota

Kediri.

Tabel I
Sebaran Pustakawan di Provinsi Jawa Timur

No	Instansi	Jumlah
1	Akademi Keperawatan Lumajang	1
2	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Dan Keluarga Kab. Tulungagung	1
3	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian	1
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi	1
5	Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur	14
6	Bag. Humas Protokol Setda Kab. Banyuwangi	1

⁵ Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, lihat Pasal 1 UU No. 43/ 2007 Tentang Perpustakaan.

7	Bag. Humas Protokol Setda Kab. Sumenep	3
8	Bag. Humas Setda Kab. Jember	1
9	Bag. Humas Setda Kab. Pamekasan	1
10	Bag. Humas Se/Tda Kota Pasuruan	1
11	Bag. Organisasi Setda Kab. Ngawi	1
12	Bagian Humas Setda Kab. Malang Sekretariat Daerah	2
13	Bpmk Kota Malang	1
14	Deptan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	1
15	Deptan. Balitbang Pertanian, Balitkabi (Malang)	1
16	Deptan. Laboratorium Desiminasi Wonocolo	2
17	Dinas P Dan K Provinsi Jawa Timur	1
18	Dinas Pu Pengairan Provinsi Jawa Timur	1
19	Iain Sunan Ampel Surabaya	4
20	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Its)	25
21	Kantor Arsip Perpustakaan Kab. Sumenep	1
22	Kantor Arsip, Pde Perpustakaan	1
23	Kantor BKKBN Kab. Blitar	1
24	Kantor BKKBN Kab. Ngawi	1
25	Kantor BKKBN Kota Surabaya	1
26	Kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur	2
27	Kantor Informasi Dan Komunikasi Daerah Kab. Nganjuk	1
28	Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah (Kab. Ngawi)	1
29	Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kab. Nganjuk	2
30	Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Lumajang	4
31	Kantor Perpustakaan Umum (Kab. Banyuwangi)	2
32	Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kab. Situbondo	1
33	Perpustakaan Umum Kab. Jombang	1
34	Perpustakaan Umum Kab. Trenggalek	1
35	Perpustakaan Umum Kab. Tulungagung	1
36	Politeknik Negeri Jember	3
37	Puslitbang Sistem Dan Kebijakan Kesehatan	3
38	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung	1
39	Setda Kab. Ngawi	1
40	SMPN 1 Kediri	2
41	Universitas Airlangga (Unair)	39
42	Universitas Brawijaya (Unibraw)	24
43	Universitas Jember	20
44	Universitas Negeri Malang	28
45	Universitas Negeri Surabaya (Unesa)	19
46	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri	4

47	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo	3
48	Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Kediri	6
49	Upt Perpustakaan Proklamator Bung Karno Kota Blitar	4
	Jumlah	239

Sumber: Perpustakaan Nasional RI tahun 2010

Data di atas menunjukkan rendahnya angka pustakawan di sekolah, sehingga tidak mengejutkan apabila RSBI, SBI atau sekolah model belum menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pengembangan.

1) Kualitas bahan pustaka buruk

Bahan pustaka atau koleksi perpustakaan di sekolah-sekolah dari segi jumlah maupun variasinya masih sangat terbatas, bahkan umumnya perpustakaan hanya mengkoleksi buku paket, LKS, Peta, bahkan beberapa perpustakaan sekolah tidak berbeda dengan gudang, karena koleksinya adalah koleksi tua, tidak mengalami penambahan koleksi baru, kecuali buku paket—itupun kiriman dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Nasional dan hanya menumpuk di rak. Sedikit sekali perpustakaan sekolah yang sudah berpikir bagaimana mengembangkan koleksinya, sehingga koleksi perpustakaan bisa selalu *up to date*. Buruknya bahan pustaka membuat perpustakaan tidak menarik dan tidak dimintai oleh siswa maupun guru.

2) Tidak ada dukungan dari Kepala Sekolah

Ujung dari semua persoalan perpustakaan di sekolah adalah tidak adanya dukungan kebijakan dari Kepala Sekolah. Beberapa sekolah yang telah memiliki pustakawan atau staf yang pernah mengikuti pelatihan perpustakaan tidak bisa mengembangkan diri atau beraktualisasi, karena Kepala Sekolah belum memiliki visi untuk mengembangkan perpustakaan.

Perpustakaan yang baik butuh dukungan kebijakan dari "*top manajemen*" (kepala sekolah), karena apalah seorang pengelola perpustakaan bila kepala sekolah tidak mem-*back up* dengan kebijakan. Inilah pentingnya dukungan kebijakan kepala sekolah demi keberlangsungan dan pengembangan perpustakaan sekolah. Tidak adanya dukungan kebijakan dari kepala sekolah akan berdampak pada: pengembangan perpustakaan tidak menjadi

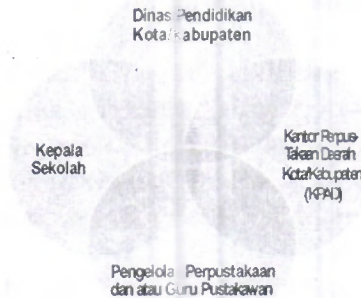
prioritas program kerja seorang kepala sekolah, anggaran perpustakaan tidak jelas, pengembangan SDM perpustakaan tidak pernah diperhatikan sehingga berujung pada perpustakaan hanya sebagai pelengkap penderita dalam sebuah lembaga pendidikan.

Kurikulum sudah berkali-kali ganti, kepala sekolah ganti, guru berkali-kali mengikuti penataran, tetap saja perpustakaan tidak banyak mengalami perubahan.

C. Bagaimana Solusinya

Untuk Mendorong agar masalah-masalah perpustakaan menjadi prioritas Program di setiap sekolah, bisa diilustrasikan dalam bagan berikut:

Bagan I PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH



Untuk mendorong Perpustakaan sekolah bisa berkembang sesuai dengan harapan, harus diupayakan agar 4 (empat) komponen di atas bisa bertemu dalam satu forum. Hal ini maksudkan agar program pengembangan perpustakaan bisa sinergi dengan kebijakan di tingkat sekolah dan atau tingkat di atasnya (Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten).

Banyak Kepala Sekolah yang belum memahami fungsi dan peran perpustakaan di Sekolah. Di sinilah perlunya campur tangan Dinas Pendidikan setempat. Kepala Sekolah akan memiliki komitmen terhadap pengembangan perpustakaan jika ada *force* dari Kepala Dinas Pendidikan. Untuk mencapai tujuan itu, Dinas Pendidikan perlu mengumpulkan kepala sekolah dalam sebuah

forum ilmiah. Seminar, Semiloka atau kegiatan ilmiah lainnya tentang "Urgensi Perpustakaan Sekolah dalam Mewujudkan Budaya Mutu atau Sekolah Unggul di Sekolah" bisa digagas dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Melalui forum itu Kepala Sekolah diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif bagaimana mestinya sekolah memperlakukakan perpustakaan.

Terlibatnya Dinas Pendidikan dalam program pengembangan perpustakaan diharapkan di samping melakukan *force* dalam bentuk aturan, juga bisa dalam bentuk mencari solusi terhadap masalah-masalah minimnya anggaran pengembangan perpustakaan, di samping itu peran supervisi juga bisa dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang telah lebih dahulu menerima bantuan pengembangan perpustakaan. Beberapa Sekolah yang telah memiliki pustakawan akan mengalami kendala dalam hal pengembangan perpustakaan jika Kepala Sekolah tidak memberikan dukungan, sepintar atau setrampil apapun seorang pustakawan di sekolah apabila program-program pengembangan perpustakaan yang ia rencanakan tidak akan efektif tanpa *back up* kebijakan dari Kepala Sekolah.

Di samping mengorganisir Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan juga perlu untuk menyiapkan program pelatihan teknis bagi pengelola perpustakaan. Karena belum semua sekolah memiliki pustakawan, guru pustakawan atau pengelola perpustakaan yang telah dibekali dengan pengetahuan teknis pengelolaan perpustakaan. Kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) atau Perpustakaan Provinsi. Kantor Perpustakaan Daerah bisa menampilkan perannya sebagai mitra Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan, seminar, workshop dan kegiatan-kegiatan pengembangan SDM pengelola perpustakaan.

Sedangkan Guru Pustakawan adalah guru sekolah yang mendapatkan pendidikan tambahan di bidang perpustakaan minimal 30 SKS. Ia memiliki berperan untuk mengoptimal fungsi perpustakaan kepada semua komponen sekolah (murid, guru, dan karyawan). Ia adalah jembatan antara guru-murid-kepala sekolah dalam hal optimalisasi peran perpustakaan. Jadi guru pustakawan adalah mitra pustakawan untuk mensosialisasikan pentingnya

masi. Guru pustakawan diperlukan karena adanya perubahan pola pembelajaran dari *teacher centered* menuju *student centered*.⁶ Mengubah persepsi siswa dan guru terhadap perpustakaan harus dimulai dengan mengubah performa perpustakaan. Perubahan tersebut hanya akan terwujud apabila mendapat dukungan dari *rule maker*, baik di tingkat sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat.

D. Kesimpulan

Kerjasama antara empat komponen di atas diharapkan akan menjadikan masalah perpustakaan menjadi masalah bersama antara semua pihak, sehingga eksistensi perpustakaan untuk mendorong terwujudnya kualitas pendidikan di sekolah bisa segera diwujudkan. Dan dari empat komponen tersebut, langkah awal bisa dimulai dari Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten untuk membuat kebijakan tentang pentingnya pemberdayaan perpustakaan sekolah. Kemudian ditindaklanjuti dengan evaluasi atau kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Masruri dan Sri Rohyanti Zulaikha (ed.), *Coursepack on school/ teacher librarianship*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 53.
- Lasa Hs., *Mana jemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: PINUS, 2007, hlm. 11.
- Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* Pasal 42-42
- Seminar Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Kediri, 21 Desember 2009 masalah serupa juga banyak dikeluhkan oleh pengelola perpustakaan yang menjadi peserta pada acara tersebut.
- UU No. 43/ 2007 Tentang Perpustakaan.
- Workshop Aplikasi Teknologi Informasi & Pengembangan Perpustakaan*, STAIN Kediri, Sabtu, 20 Juni 2009

⁶ Lasa Hs., *Manajemen...* hlm. 40.